

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

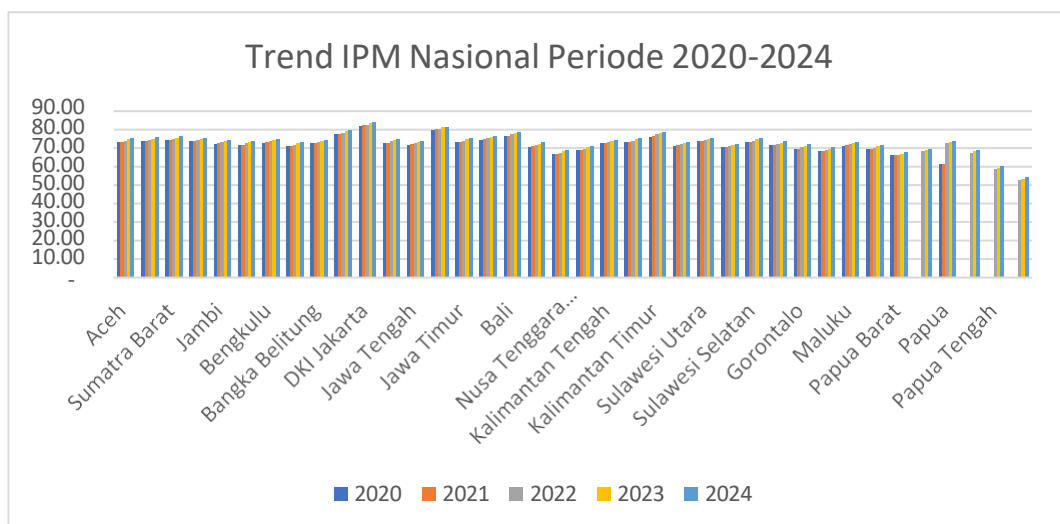
Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah salah satunya dinilai melalui capaian pembangunan manusianya. Konsep ini tidak semata bertumpu pada laju pertumbuhan ekonomi, melainkan turut menggambarkan mutu kehidupan penduduk yang tercermin dari sisi pendidikan, kesehatan, serta kelayakan taraf hidup. *United Nations Development Programme* (UNDP, 2024) merilis laporan pembangunan manusia 2024, yang menekankan bahwa tingkat pembangunan manusia merupakan faktor utama dalam kemampuan suatu negara untuk menangani masalah-masalah global seperti pandemi, perkembangan teknologi, dan perubahan dalam perekonomian internasional. Dalam konteks global, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu tujuan utama *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus peningkatan kualitas manusia secara menyeluruh.

Di Indonesia, IPM mengukur kualitas hidup. Indeks ini terdiri dari tiga bidang utama: pendidikan, kesehatan dan umur panjang, serta standar hidup yang layak (BPS Kab Kebumen, 2024). Dari 72,81 pada tahun 2020 menjadi 75,02 pada tahun 2024 (BPS, 2024), IPM Indonesia secara nasional terus meningkat. Peningkatan ini terjadi meskipun Indonesia menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemik *COVID-19*. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah ketimpangan pembangunan manusia antarwilayah, di mana capaian IPM ditingkat provinsi dan kabupaten/kota sangat bervariasi. Skor IPM di provinsi-provinsi yang terletak di pulau Jawa dan Bali lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi

di Indonesia bagian timur, seperti Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Di sisi lain, provinsi-provinsi di Sumatra dan Kalimantan berada di peringkat menengah dan masih terus berkembang. Kondisi ini menggambarkan betapa beragamnya realitas pembangunan manusia di Indonesia yang tidak cukup hanya dipelajari dalam satu wilayah pulau saja.

**Grafik 1.1**

**Indeks Pembangunan Manusia Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2024**



*Sumber: Badan Pusat Statistik 2020-2024*

Dalam kerangka desentralisasi fiskal yang dianut Indonesia sejak “Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999”, pemerintah daerah memiliki otoritas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya fiskal sendiri (Badan Kebijakan Fiskal, 2021). Keterkaitan logis antara kebijakan fiskal daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia bertumpu pada kapasitas anggaran dalam mengintervensi tiga dimensi dasar kemanusiaan; umur panjang dan hidup sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), serta standar hidup layak (ekonomi). Pajak daerah bertindak sebagai instrumen vital *local taxing power* berdasarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Badan Kebijakan Fiskal, 2021). Peningkatan penerimaan pajak daerah memberikan diskresi dan kemandirian fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mendanai program-program sosial yang menyesuaikan kebutuhan spesifik masyarakat lokal tanpa bergantung pada birokrasi transfer pusat. Sementara itu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan cerminan dari agrerat output ekonomi dan produktivitas daerah. Melalui pertumbuhan PDRB, terjadi *multiplier effect* berupa perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan riil per kapita masyarakat, yang secara langsung meningkatkan daya beli untuk mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan yang bermutu tinggi (Robert Lucas, 1988, dalam Juhro & Trisnanto, 2018).

Pada sisi transfer pusat, Dana Alokasi Umum (DAU) difungsikan sebagai mekanisme ekualisasi untuk menjembatani celah fiskal antardaerah di Indonesia. Keberadaan DAU memastikan daerah dengan basis ekonomi lemah tetap memilih likuiditas yang cukup untuk membayar belanja pegawai seperti guru dan tenaga medis, serta operasional dasar pelayanan publik pembentuk Indeks Pembangunan Manusia. Terakhir, Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki jalur kausalitas paling linier karena bersifat *spesific grant*. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (UU No 1 Tahun 2022), DAK dioptimalkan untuk mendanai langsung penyediaan sarana fisik dan infrastruktur dasar pelayanan publik seperti pembangunan gedung sekolah, pengadaan alat kesehatan puskesmas, serta akses

air bersih yang menjadi indikator utama pembentuk angka harapan hidup dan lama sekolah dalam Indeks Pembangunan Manusia.

Keempat variabel tersebut secara teoritik berkaitan langsung dengan kemampuan pemda dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas di ranah pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar, dimana dalam hal ini merupakan komponen utama dalam pengukuran IPM. Landasan teoritik ini ditopang oleh teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan Oates (1993), yang menegaskan bahwa pemerintah daerah yang diberi otonom fiskal akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya dan lebih efisien dalam mengalokasikan sumber daya publik.

Namun demikian, berbagai penelitian empiris menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Ifan Maulana dan Ichsan (2022) membuktikan bahwa PDRB berkontribusi positif terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara. Sementara, Evi Sulastri dan Efendri (2021) menemukan bahwa DAU dan DAK justru memengaruhi dengan negatif atas IPM di berbagai Provinsi Kalimantan, mengindikasikan adanya permasalahan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana transfer. Saragih (2019) menemukan bahwasanya pajak daerah memengaruhi secara positif serta pesat atas IPM di 34 provinsi di Indonesia, sementara Fahma Arrosyid dan Dwi Bayu Bawono (2023) menyimpulkan bahwasanya DAU, DAK, serta DBH tidak memengaruhi secara pesat atas IPM di 34 provinsi. Berbeda dengan hasil Hanantoko (2020) yang menemukan pengaruh signifikan variabel-variabel fiskal tersebut di Jawa Timur.

Inkonsistensi hasil penelitian-penelitian tersebut sebagian besar dapat dijelaskan oleh perbedaan wilayah studi serta waktu pengamatan yang dipergunakan. Mayoritas penelitian terdahulu dilakukan hanya di satu provinsi atau wilayah tertentu saja, sehingga hasil yang diperoleh belum tentu dapat digeneralisasi pada skala yang lebih luas. Selain itu, banyak penelitian yang menggunakan variabel PAD secara keseluruhan tanpa memisahkan kontribusi pajak daerah secara spesifik, sehingga gambaran tentang pengaruh pajak daerah terhadap IPM masih terbatas.

Mengingat hal-hal tersebut dan kurangnya penelitian, tujuan studi ini adalah untuk menganalisis bagaimana pajak daerah, PDRB, DAU, dan DAK memengaruhi IPM di seluruh wilayah Indonesia pada periode 2020 hingga 2024. Temuan penelitian ini diharapkan mampu menyajikan bukti empiris yang lebih menyeluruh perihal efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam memperbaiki mutu pembangunan manusia di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kebijakan fiskal daerah memegang peranan sentral dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Namun, sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang, berbagai penelitian terdahulu menghasilkan temuan yang beragam mengenai pengaruh instrumen-instrumen fiskal seperti pajak daerah, PDRB, DAU, dan DAK terhadap IPM. Ketidakkonsistenan ini semakin terasa ketika dikaitkan dengan perbedaan karakteristik antar provinsi di Indonesia yang sangat beragam, baik dari sisi kapasitas fiskal, struktur ekonomi, maupun kondisi sosial demografinya. Berdasarkan pembahasan sebelumnya dan daftar celah

penelitian yang telah disebutkan di atas, berikut ini adalah pertanyaan penelitian untuk studi ini:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di seluruh provinsi Indonesia periode 2020-2024?
2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di seluruh provinsi Indonesia periode 2020-2024?
3. Apakah pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di seluruh provinsi Indonesia periode 2020-2024?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di seluruh provinsi Indonesia periode 2020-2024?
5. Apakah pajak daerah, PDRB, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di seluruh provinsi Indonesia periode 2020-2024?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adanya perbedaan kesimpulan di antara peneliti terdahulu mendorong penelitian ini dilaksanakan guna membuktikan bahwa faktor-faktor tersebut memang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk membahas isu-isu berikut yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang telah disebutkan di atas:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di seluruh provinsi Indonesia periode 2020-2024.

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di seluruh provinsi Indonesia periode 2020-2024.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di seluruh provinsi Indonesia periode 2020-2024.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di seluruh provinsi Indonesia periode 2020-2024.
5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah, PDRB, DAU dan DAK secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di seluruh provinsi Indonesia periode 2020-2024.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian:**

Adapun kegunaan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Temuan studi ini diharap bisa menjadi referensi untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber pembelajaran mahasiswa atau umum.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Temuan studi ini diharap bisa dijadikan suatu landasan pertimbangan bagi otoritas pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun regional, dalam merumuskan strategi fiskal yang lebih optimal dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Studi ini mempunyai sistematika penulisan yang bermaksud guna mempermudah didalam penyusunan secara sistematis. Dengan begitu perlu diperlihatkan sistematika penulisan berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan dijelaskan latar belakang masalah serta alasan pemilihan topik penelitian. Bagian pernyataan masalah juga memaparkan struktur makalah, tujuan dan kontribusi penelitian, serta faktor-faktor yang mendasari pemilihan topik tersebut.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini bertujuan, antara lain, untuk menjelaskan gagasan-gagasan yang mendasari penelitian ini dan membedakannya dari penelitian lain. Kerangka konseptual yang menguraikan keterkaitan antara variabel-variabel penelitian dan teori-teori yang mendasarinya, uraian mengenai masing-masing variabel independen dan dependen, serta beberapa hipotesis kerja mengenai hasil penelitian melengkapi penjelasan ini.

### BAB III METODE PENELITIAN

Untuk mengkaji topik penelitian, bab metodologi ini menjelaskan pendekatan penelitian. Variabel-variabel penelitian didefinisikan dan dijelaskan dalam bab ini, beserta makna operasionalnya. Penelitian ini memuat informasi mengenai variabel, populasi, jumlah partisipan, sampel, ukuran sampel, dan proses seleksi, serta

teknik pengambilan sampel, lokasi, jenis, dan sumber data. Metode pengumpulan dan analisis data juga dijelaskan secara rinci, termasuk prosedur spesifik yang diikuti selama pengumpulan data serta uraian mengenai strategi pengolahan data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan studi.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Ringkasan topik, analisis dan interpretasi data, landasan penelitian, serta karakteristik demografis variabel penelitian semuanya dibahas dalam bab ini. Selain itu, prosedur analisis data didalam studi ini juga dijelaskan secara rinci di sana, beserta kesimpulan dari analisis tersebut.

#### BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir, penelitian ini merangkum tujuan dan temuan penelitian serta memberikan saran mengenai bagaimana penelitian-penelitian selanjutnya dapat mengembangkan temuan-temuan ini. Tinjauan tersebut mengungkap beberapa keterbatasan dan kekurangan didalam studi ini, yang dijelaskan dalam bab ini bersama dengan rekomendasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.